

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan manusia merupakan suatu pertumbuhan positif dan perubahan dalam tingkat kesejahteraan. Yang mana hal ini harus terjadi di semua aspek kehidupan, baik itu aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, dan juga lingkungan. Maka dari itu, hal yang difokuskan dalam pembangunan manusia adalah pada manusia itu sendiri dan kesejahteraannya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu cara dalam pengukuran atas pencapaian pembangunan manusia yang berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.²

Adapun tiga indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia) tersebut adalah: indikator kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. kualitas fisik dilihat dari usia harapan hidup, sedangkan kualitas non fisik dilihat dari rata-rata lama sekolah penduduk dan juga tingkat melek huruf sebagai pertimbangan kemampuan ekonomi yaitu pengeluaran riil per kapita.³

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator komposit tunggal yang walaupun tidak bisa mengukur seluruh dimensi menurut

² Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2014*, (jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015), hal. 10

³ Dede Afri Maidoni, *Pengaruh Investasi Sumber Daya Manusia Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di provinsi Riau*, Vol II No.02, (Oktober, 2015), hal 1-2

pembangunan manusia, namun mengukur 3 dimensi utama pembangunan insan yang dievaluasi bisa mencerminkan kemampuan dasar (basic capabilities) penduduk.

Berikut ini tabel Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1.1 Data IPM Kab/Kota di Prov Jawa Timur

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	IPM		
	2019	2020	2021
Kabupaten Pacitan	68,16	68,39	68,57
Kabupaten Ponorogo	70,56	70,81	71,06
Kabupaten Trenggalek	69,46	69,74	70,06
Kabupaten Tulungagung	72,62	73	73,15
Kabupaten Blitar	70,57	70,58	71,05
Kabupaten Kediri	71,85	72,05	72,56
Kabupaten Malang	70,35	70,36	70,6
Kabupaten Lumajang	65,33	65,46	66,07
Kabupaten Jember	66,69	67,11	67,32
Kabupaten Banyuwangi	70,6	70,62	71,38
Kabupaten Bondowoso	66,09	66,43	66,59
Kabupaten Situbondo	67,09	67,38	67,78
Kabupaten Probolinggo	65,6	66,07	66,26
Kabupaten Pasuruan	68,29	68,6	68,93
Kabupaten Sidoarjo	80,05	80,29	80,65
Kabupaten Mojokerto	73,53	73,83	74,15
Kabupaten Jombang	72,85	72,97	73,45
Kabupaten Nganjuk	71,71	71,72	71,97
Kabupaten Madiun	71,69	71,73	71,88
Kabupaten Magetan	73,49	73,92	74,15
Kabupaten Ngawi	70,41	70,54	71,04
Kabupaten Bojonegoro	68,75	69,04	69,59
Kabupaten Tuban	68,37	68,4	68,91

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	IPM		
	2019	2020	2021
Kabupaten Lamongan	72,57	72,58	73,12
Kabupaten Gresik	76,1	76,11	76,5
Kabupaten Bangkalan	63,79	64,11	64,36
Kabupaten Sampang	61,94	62,7	62,8
Kabupaten Pamekasan	65,94	66,26	66,4
Kabupaten Sumenep	66,22	66,43	67,04
Kota Kediri	78,08	78,23	78,6
Kota Blitar	78,56	78,57	78,98
Kota Malang	81,32	81,45	82,04
Kota Probolinggo	73,27	73,27	73,66
Kota Pasuruan	75,25	75,26	75,62
Kota Mojokerto	77,96	78,04	78,43
Kota Madiun	80,88	80,91	81,25
Kota Surabaya	82,22	82,23	82,31
Kota Batu	75,88	75,9	76,28
Jawa Timur	71,5	71,71	72,14

Data diperoleh dari BPS Prov Jawa Timur

Dari Tabel 1.1 Diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur terus mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 71,5%, pada tahun 2020 meningkat menjadi 71,71% dan pada tahun 2021 menjadi 72,14%. Dan dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia Tertinggi yaitu pada Kota Malang yaitu pada tahun 2019 sebesar 81,32%, pada tahun 2020 sebesar 81,45% dan pada tahun 2021 sebesar 82,04%. dan Indeks Pembangunan Manusia Terendah yaitu pada Kabupaten Sampang yaitu pada tahun 2019 sebesar 61,94%, pada tahun 2020 sebesar 62,7% dan tahun 2021 sebesar 62,8%.

Kemiskinan merupakan suatu perkara pada pembangunan yang

bisa terjadi pada negara maju juga negara berkembang. Di negara berkembang kemiskinan merupakan salah satu isu yang besar dalam perekonomian Indonesia, yang sebagai suatu “ Pekerjaan Rumah” yang belum terselesaikan. Usaha-usaha dalam mengatasi kemiskinan juga telah dilakukan menggunakan aneka macam cara, misalnya acara donasi kapital atau uang tunai pada masyarakat hingga program transmigrasi.⁴

Kemiskinan merupakan suatu yang tidak gampang diartikan, lantaran didalam kemiskinan sendiri masih ada unsur ruang dan waktu. Menurut Alhudhori, Kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang tidak bisa membeli suatu barang kebutuhan misalnya makanan, pakaian, papan, dan obat-obatan. Sedangkan berdasarkan Bank Dunia, kemiskinan memiliki arti menjadi tiadanya loka tinggal, sakit dan tidak mempunyai kemampuan untuk pergi ke dokter, tidak mampu sekolah, dan tidak bisa baca tulis. Secara sederhana, kemiskinan diartikan menjadi kekurangan menurut banyaknya aspek yang mengukur taraf suatu kesejahteraan masyarakat.⁵

Upaya penanggulangan kemiskinan dikatakan efektif jika memberitahukan tanda menurunnya jumlah penduduk miskin,

⁴ Ari Kristin rasetyoningrum, U. Sulia Sukmawati, *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia*, EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 6, No. 2, 2018, hal.218.

⁵ Lora Ekana Nainggolan,dkk,*Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Permbangunan Manusia Yang Berdampak pada Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara*, Open Jurnal System, Vol. 15, No. 10, Mei 2021, hal. 54

bertambahnya taraf pendapatan individu, dan menguatnya daya beli masyarakat.

Tabel 1.2 Data Persentase Penduduk Miskin di Prov Jawa Timur

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Persentase Penduduk Miskin		
	2019	2020	2021
Kabupaten Pacitan	9,64	9,95	15,11
Kabupaten Ponorogo	10,98	11,62	10,26
Kabupaten Trenggalek	6,74	7,33	12,14
Kabupaten Tulungagung	8,94	9,33	7,51
Kabupaten Blitar	10,42	11,4	9,65
Kabupaten Kediri	9,47	10,15	11,64
Kabupaten Malang	9,49	9,83	10,5
Kabupaten Lumajang	9,25	10,09	10,05
Kabupaten Jember	7,52	8,06	10,41
Kabupaten Banyuwangi	13,33	14,17	8,07
Kabupaten Bondowoso	11,2	12,22	14,73
Kabupaten Situbondo	17,76	18,61	12,63
Kabupaten Probolinggo	8,68	9,26	18,91
Kabupaten Pasuruan	5,32	5,59	9,7
Kabupaten Sidoarjo	9,75	10,57	5,93
Kabupaten Mojokerto	9,22	9,94	10,62
Kabupaten Jombang	11,24	11,62	10
Kabupaten Nganjuk	10,54	11,46	11,85
Kabupaten Madiun	9,61	10,35	11,91
Kabupaten Magetan	14,39	15,44	10,66
Kabupaten Ngawi	12,38	12,87	15,57
Kabupaten Bojonegoro	14,58	15,91	13,27
Kabupaten Tuban	13,21	13,85	16,31
Kabupaten Lamongan	11,35	12,4	13,86
Kabupaten Gresik	18,9	20,56	12,42
Kabupaten Bangkalan	20,71	22,78	21,57
Kabupaten Sampang	13,95	14,6	23,76

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Persentase Penduduk Miskin		
	2019	2020	2021
Kabupaten Pamekasan	19,48	20,18	15,3
Kabupaten Sumenep	7,16	7,69	20,51
Kota Kediri	7,13	7,78	7,75
Kota Blitar	4,07	4,44	7,89
Kota Malang	6,91	7,43	4,62
Kota Probolinggo	6,46	6,66	7,44
Kota Pasuruan	5,15	6,24	6,88
Kota Mojokerto	4,35	4,98	6,39
Kota Madiun	4,51	5,02	5,09
Kota Surabaya	3,81	3,89	5,23
Kota Batu	3,81	3,89	4,09
Jawa Timur	13,67	14,54	11,4

Data dari BPS Prov. Jawa Timur

Dari Tabel 1.2 pada Tabel Persentase Penduduk Miskin, diketahui bahwa Kemiskinan pada Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 sebesar 13,67%, dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 14,54% dan pada tahun 2021 turun yaitu 11,4%. Nilai kemiskinan tertinggi yaitu pada Kabupaten Bangkalan yaitu pada tahun 2019 sebesar 20,71%, pada tahun 2020 sebesar 22,78%, dan tahun 2021 sebesar 21,57%. sedangkan nilai Kemiskinan terendah yaitu pada Kota Batu pada tahun 2019 sebesar 3,81%, pada tahun 2020 sebesar 3,89%, dan pada tahun 2021 sebesar 4,09%.

Pengangguran adalah suatu kasus yang relatif kompleks lantaran ditentukan oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu gampang dipahami. Dan bila kasus pengangguran tidak segera diatasi maka akan mengakibatkan kerawanan sosial yang berpotensi

menyebabkan kemiskinan. Pengangguran sendiri tidak hanya disebabkan oleh kurangnya lowongan pekerjaan, namun juga disebabkan kurangnya keterampilan seseorang dalam syarat untuk melamar pekerjaan. Tingkat pengangguran juga menjadi tolak ukur bagi keberhasilan pembangunan didalam suatu negara. Yang mana apabila tingkat pengangguran suatu negara itu rendah berarti negara tersebut bisa dikatakan berhasil dalam pembangunannya, sedangkan apabila terjadi ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia maka diartikan tingkat pengangguran negara tersebut akan tinggi. Berikut ini merupakan Data Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1.3 Data Pengangguran Kab/Kota di Prov Jawa Timur

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur (Persen)		
	2019	2020	2021
Kabupaten Pacitan	0,91	2,28	2,04
Kabupaten Ponorogo	3,5	4,45	4,38
Kabupaten Trenggalek	3,36	4,11	3,53
Kabupaten Tulungagung	3,29	4,61	4,91
Kabupaten Blitar	3,05	3,82	3,66
Kabupaten Kediri	3,58	5,24	5,15
Kabupaten Malang	3,7	5,49	5,4
Kabupaten Lumajang	2,73	3,36	3,51
Kabupaten Jember	3,69	5,12	5,44
Kabupaten Banyuwangi	3,95	5,34	5,42
Kabupaten Bondowoso	2,86	4,13	4,46
Kabupaten Situbondo	2,77	3,85	3,68
Kabupaten Probolinggo	3,77	4,86	4,55
Kabupaten Pasuruan	5,22	6,24	6,03
Kabupaten Sidoarjo	4,62	10,97	10,87

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur (Persen)		
	2019	2020	2021
Kabupaten Mojokerto	3,61	5,75	5,54
Kabupaten Jombang	4,28	7,48	7,09
Kabupaten Nganjuk	3,16	4,8	4,98
Kabupaten Madiun	3,52	4,8	4,99
Kabupaten Magetan	2,98	3,74	3,86
Kabupaten Ngawi	3,6	5,44	4,25
Kabupaten Bojonegoro	3,56	4,92	4,82
Kabupaten Tuban	2,7	4,81	4,68
Kabupaten Lamongan	3,89	5,13	4,9
Kabupaten Gresik	5,4	8,21	8
Kabupaten Bangkalan	5,62	8,77	8,07
Kabupaten Sampang	2,71	3,35	3,45
Kabupaten Pamekasan	2,26	3,49	3,1
Kabupaten Sumenep	2,08	2,84	2,31
Kota Kediri	4,15	6,21	6,37
Kota Blitar	4,54	6,68	6,61
Kota Malang	5,88	9,61	9,65
Kota Probolinggo	4,25	6,7	6,55
Kota Pasuruan	4,89	6,33	6,23
Kota Mojokerto	2,63	6,74	6,87
Kota Madiun	3,96	8,32	8,15
Kota Surabaya	5,76	9,79	9,68
Kota Batu	2,42	5,93	6,57
Jawa Timur	3,82	5,84	5,74

Data BPS Provinsi Jawa Timur

Dari Data Tabel 1.3 diatas bahwa data Pengangguran di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 sebesar 3,82%, pada tahun 2020 sebesar 5,84%, dan tahun 2021 sebesar 5,74%. Dan nilai Pengangguran tertinggi yaitu pada Kabupaten Sidoarjo yaitu pada tahun 2019 sebesar 4,62%, pada tahun 2020 sebesar 10,97%, dan pada tahun 2021 sebesar 10,87%,

sedangkan nilai Pengangguran terendah yaitu pada Kabupaten Pacitan pada tahun 2019 sebesar 0,91%, pada tahun 2020 sebesar 2,28% dan tahun 2021 sebesar 2,04%. Maka hal ini pemerintah perlu upaya dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi dalam mengatasi pengangguran.

Penelitian ini dilakukan dengan alasan masalah perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur adalah masalah Pengangguran dan Kemiskinan. Tingginya tingkat kemiskinan dan Pengangguran jika tidak segera diatasi akan mengakibatkan penduduk miskin dan pengangguran yang tinggi. Yang juga Hal ini juga dikarenakan Indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur tidak sejalan dengan kesejahteraan masyarakatnya dilihat dari Pengangguran dan Kemiskinan yang masih tinggi. Berdasarkan data dan uraian diatas mengenai Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, dan Pengangguran di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian penulis termotivasi melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2021”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2021?
2. Bagaimana Pengaruh tingkat pengangguran terhadap indeks

pemangunan manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2021?

3. Bagaimana pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2021 secara simultan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2021.
2. Untuk Mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia(IPM) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan dan pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2021 secara simultan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Pemerintah: Berguna untuk melihat dan mengetahui bagaimana perkembangan mengenai kesejahteraan rakyat melalui pembangunan insan manusia di Provinsi Jawa Timur. Sehingga bisa memberi berita bagi pihak yang berwenang menentukan kebijakan dalam membuat suatu keputusan untuk bagaimana tindakan selanjutnya dalam membangun Provinsi Jawa Timur yang lebih baik lagi pada pembangunan manusianya.

2. Bagi Masyarakat: Berguna untuk memberikan informasi atau berita tentang kemiskinan dan pengangguran.
3. Bagi Peneliti: Untuk menambah ilmu pengetahuan peneliti mengenai pengaruh kemiskinan dan pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia(IPM) di Provinsi Jawa Timur.
4. Bagi Peneliti Lain: Untuk menambah referensi bagi peneliti lain dan panduan untuk melakukan penelitian berikutnya.

E. Identifikasi dan Batasan Masalah

Permasalahan Penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Tingginya angka Kemiskinan mengakibatkan biaya yang akan dikeluarkan untuk pembangunan manusia akan lebih besar.
2. Tingginya Tingkat Pengangguran akan membuat rendahnya tingkat Indeks Pembangunan Manusia
3. Indeks Pembangunan Manusia pada Tahun 2019-2021 mengalami peningkatan.

Kemiskinan dibatasi dengan melihat tingkat kemiskinan, pengangguran dibatasi dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2021.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah definisi yang diambil berdasarkan teori

ahli yang sinkron menggunakan tema yang diteliti, adapun istilah konseptual pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Tingkat Kemiskinan adalah syarat ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan, atau secara lebih rinci mendeskripsikan suatu kondisi yang tidak bisa terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan.⁶
- b. Pengangguran merupakan kelompok orang yang ingin bekerja (menerima atau mengembangkan) pekerjaan namun belum berhasil mendapatkannya.⁷
- c. Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator komposit untuk mengukur pencapaian pembangunan kualitas hidup manusia.⁸

2. Definisi Operasional

Berdasarkan judul secara operasional, bahwa penelitian ini meneliti pengaruh tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

G. Sistematika Skripsi

Untuk lebih memudahkan dan memberikan gambaran yang jelas maka didalam penelitian ini disusun suatu sistematika penulisan. Pembahasan didalam skripsi ini disajikan dalam 6 bab meliputi:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini memuat latar belakang untuk

⁶ Ardito Bhinandi, Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta), (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2017), hal.9

⁷ Zaini Ibrahim, Pengantar Ekonomi Makro, (Banten: KOPSYAH BARAKA, 2013), hal.98

⁸ Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia 2020, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021)

memberikan penjelasan dari pembahasan yang diteliti. Yang berfungsi untuk mengarahkan peneliti agar tidak melebar dan untuk memperjelas peneliti memaparkan identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan ditampilkan untuk mempermudah pembaca melihat sudut pandang penulis.

BAB II LANDASAN TEORI, Bab ini memuat tentang kerangka teori yang mendukung penelitian ini serta memuat hubungan antar variabel yang terlibat didalam permasalahan yang diangkat pada penelitian ini serta kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan juga hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN, Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian yang ditinjau dari eksplanasinya. Yang memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN, Bab ini akan menampilkan Hasil Penelitian

BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN, Bab ini berisi hasil penelitian yang telah dibahas. Menjelaskan temuan-temuan penelitian yang telah dikemukakan pada hasil penelitian.

BAB VI PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan dan hasil penelitian dan saran dari bahasan. Saran yang diajukan berkaitan dengan penelitian dan merupakan anjuran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian.